

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KOTA BIMA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2020. Penyusunan Rencana kerja merupakan salah satu upaya sistematis Dinas Sosial Kota Bima dalam melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan social selama 1 (satu) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bima merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, secara menyeluruh dan merata. Selain itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, khususnya di Kota Bima.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ini dibuat, atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Raba-Bima, Januari 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. H. MUHIDIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631231 199003 1 209

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016..	8
2.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3. Isi-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	26
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	28
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	29
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD.....	31
3.3. Program dan Kegiatan (sesuai dengan form Matriks terlampir)	32
BAB VI : P E N U T U P	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat serta mutu hidup manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatkan peranan/partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu pembangunan bidang Sosial juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan sosial melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara

berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang kesejahteraan sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan bidang Sosial sebagaimana tersebut di atas, maka langkah yang tepat adalah dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Sosial Tahun 2020 dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang dimulai dari analisa situasi dan kondisi dengan menggunakan data yang akurat (valid), baik yang menyangkut berbagai masalah-masalah sosial. Melalui analisa data tersebut kita dapat mengetahui kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang, dengan demikian kita dapat menentukan target yang diharapkan maupun trend dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian kita dapat menentukan langkah kegiatan apa yang perlu dilakukan saat ini dan ke depan untuk mencapai harapan yang diinginkan sebagaimana visi pembangunan kesejahteraan sosial yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah **“Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Pengertian dan makna yang terkandung dalam visi tersebut kata kuncinya adalah :

- a. Membangun adalah upaya meningkatkan potensi sosial masyarakat melalui program dan kegiatan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.
- b. Kemandirian adalah kemampuan masyarakat membangun dirinya dalam upaya menata kehidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Kota Bima yang termasuk dalam kategori miskin, cacat, terlantar, tuna

sosial, ketertinggalan atau terpencil, korban bencana alam, dan bencana sosial.

- d. Sejahtera adalah adanya kondisi sosial ekonomi yang baik berupa memiliki pendapatan per kapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli masyarakat yang terus meningkat.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut Dinas Sosial Kota Bima menetapkan misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah selanjutnya. Misi Dinas Sosial Kota Bima adalah:

“Meningkatkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”.

1.2. Landasan Hukum.

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
 16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
 18. Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bima.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kota Bima disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja

Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan kegiatan bidang Sosial sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

- a. Mengetahui kondisi Umum Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Bima dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2020, di Bidang Sosial Kota Bima secara terpadu, terencana, terarah, dan menyeluruh.

- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bima.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bima disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulis

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan (Sesuai Dengan Form Matriks Terlampir)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bima yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) berupa: *input, output, dan outcome*. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi indikator kinerja dari setiap kegiatan serta rencana kinerja dan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Dinas Sosial Kota Bima

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian	Tingkat capaian realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1	Urusan Wajib									
1 06	Bidang Dinas Sosial									
1 06 19	Dinas Sosial									
1 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran								
1 06 1 19 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun	3000 lbr	750 Lbr	1558 Lbr	1558 Lbr	100%	2000 Lbr	1558 Lbr	77 %
		02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%	5 buah	2 buah	80%
		06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	40 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	13 Unit	29 Unit	72%
		07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1250 jenis	410 jenis	250 jenis	240 jenis	80%	250 jenis	910 jenis	72%
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang cetak dan digandakan	50000 Lbr	7000 Lbr	12000 Lbr	12000 Lbr	100%	17000 Lbr	3600Lbr	72%
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	50 unit	20 unit	10 unit	10 unit	100%	10 Unit	40Unit	80%
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	15 Media	8 Media	10 Media	10 Media	100%	12 Media	12 Media	90%
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat	30 Kali	12 Kali	6 Kali	3 Kali	50%	6 Kali	21 Kali	70%
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	84 Kali	28 Kali	20 Kali	18 Kali	90%	20 Kali	66 kali	79%
				19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah	40 Kali	8 Kali	8 Kali	0 Kali	0%	8 Kali	16 kali	40%
1	06	1 19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur								
1	06	1 19	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	3 unit-	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	7 unit	53 %
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Berfungsi dengan baik gedung kantor	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
				23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	39 Unit	31 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	3 Unit	34 Unit	87%
				24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional	Berfungsi dengan baik kendaraan dinas/Operasional yang memadai	40 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	13 Unit	29 Unit	72%
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Persentase terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
1	06	1 19	03		Program Peningkatan Disiplin	Persentase tersedianya sarana								

				Aparatur	peningkatan disiplin aparatur									
1	06	1 19	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Presentase pegawai yang memakai pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				05	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Presentase pegawai yang memakai pakaian hari-hari tertentu	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
				06	Pengadaan pakaian Olah Raga	Presentase Pegawai yang memakai pakaian Olah Raga	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	1 19	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan sesuai ketentuan								
				02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
				03	Penyusunan pelaporan keuangan Prognosis	Tersedianya pelaporan keuangan Prognosis	5 dok	2 dok	1 dok	0dok	0%	1 dok	3 dok	60%
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dok	2 dok	1 dok	1dok	100%	1 dok	4 dok	80%
				05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perngkat daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perngkat daerah	30 dok	12 dok	6 dok	4 dok	67%	6 dok	22 dok	73%
				06	Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD	Tersedianya Dokumen Lakip,LPJ dan LPPD	15 dok	6 dok	3 dok	2 dok	67%	3 dok	11 dok	73 %
1	06	1 19	17		Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang Terlatih								
				1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial	Jumlah PSM/TKSK yang diberdayakan	300 orang	38 orang	38 orang	38 orang	100 %	60 orang	136 orang	45 %

					pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
				3	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih	1.200 KK	120 KK	120 KK	120 KK	100 %	240 KK	480 KK	40%	
				6	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PMKS seluruhnya	11.710 PMKS	7986	2690	8060	86,36			73%	
					Penyuluhan Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial	250 org	50 org	50 org	50 org	100 %	50 org	150 Org	60 %	
					Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Basis data Fakir miskin	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	3 laporan	60 %	
					Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	Jumlah Keluarga PKH dan KKS	11000 KK	8393 KK	8393 KK	8393 KK	100 %	9400 KK	9400 KK	86 %	
1	06	1 19	19		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial									
				2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	32 LKS	27 LKS	29 LKS	29 LKS	100 %	30 LKS	30 LKS	93 %	
				6	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	100 org	50 org	55 org	50 org	90 %	45 org	95 org	95 %	
				7	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Lomba PSKS	5 keg	5 keg	4 keg	4 keg	100 %	4 keg	4 keg	95 %	
														93 %	
1	06	1 19	20		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial									

				1	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terlatih	80 %	30 %	50 %	50 %	100 %	60 %	60 %	75 %
				2	Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang dilayani psikososialnya	80 %	30 %	50 %	50 %	100 %	60 %	60 %	75 %
				3	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan	250 org	30 org	40 org	40 org	100 %	50 org	120 org	48 %
				4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	80 %	30 %	50 %	50 %	100 %	60 %	60 %	75 %
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial								
					Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	73.232 KK	3435 KK	6263 KK	6263 KK	100 %	6263 KK	15.961 KK	22 %
					Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat	80 %	30 %	50 %	50 %	100 %	60 %	60 %	75 %
					Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial	Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	5 klpk	2 klpk	1 klpk	1 klpk	100 %	2 klpk	3 klpk	60 %
					Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah	50.000 org	7933 org	16.600 org	16.600 org	100 %	10.147 org	34.147 org	68 %
					Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani	80 %	20 %	35 %	35 %	100 %	15 %	70 %	90 %
					Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Basis data dana bantuan sosial	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	3 laporan	60 %
														0 %

❖ **Penjelasan Tabel 1:**

- a. Hampir seluruh Program dan Kegiatan yang terdapat dalam DPA Dinas Sosial telah terakomodir sesuai dengan Renstra Dinas Sosial 2019-2023 dengan rata-rata realisasi sebesar 80 %.
- b. Ada pergantian nama program yang disesuaikan dengan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bima.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kota Bima

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Penurunan PMKS	80		18,52%	21,30%	24,40%	48,62 %	49,95 %	54,30 %	25 %	28 %	

Sumber: Dinas Sosial 2018

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bima termuat pada **tabel kinerja pelayanan (terlampir)**.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu-isu penting yang berkembang dan berkaitan dengan TUPOKSI Dinas Sosial Kota Bima dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal, baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) wanita rawan sosial ekonomi; (3) masyarakat yang tinggal di daerah kumuh.
2. Ketelantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami ketelantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.
3. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda.
4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian secara normative, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkoba, (5) gelandangan, (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
5. Korban Bencana, meliputi korban bencana alam, bencana sosial.
6. Korban Tindak Kekerasan meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti; (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban kekerasan, dan (4) pekerja migrant korban tindak kekerasan.
7. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) PSM, (2) Karang Taruna, (3) Orsos/LSM, dan (4) WKSBM (5)

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), (6) Dunia Usaha

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa rancangan awal RKPD telah sesuai dengan yang diharapkan, baik program dan kegiatan. Rencana kerja yang telah disampaikan Dinas Sosial Kota Bima telah memenuhi usulan masyarakat. Tabel berikut menunjukkan review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2020 **(tabel terlampir)**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Beberapa bentuk kebijakan nasional yang akan dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna memperoleh data yang valid sebagai dasar pertimbangan pembuatan program dan kegiatan.
2. Menggali dan mengembangkan kegiatan sesuai potensi yang ada di masing-masing kelurahan.
3. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi/mengetahui serta mendata permasalahan sosial secara dini.
4. Optimalisasi peran organisasi melalui penguatan sistem dan penataan kelembagaan.

Selanjutnya secara nasional untuk menjalankan kebijakan nasional, telah ditetapkan beberapa strategi, diantaranya ;

1. *Pemberdayaan*, yaitu melakukan pemberdayaan bagi masyarakat; PMKS, PSKS, melalui pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah dalam dirinya sesuai dengan kondisi lingkungannya.
2. *Kemitraan sosial*, yaitu melakukan kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
3. *Partisipasi sosial*, yakni adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

4. *Advokasi sosial*, yaitu upaya-upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

1. Tujuan

Adapun tujuan secara umum pelaksanaan program atau kegiatan tahun 2020 pada Dinas Sosial Kota Bima adalah :

Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

2. Sasaran

Adapun sasaran secara umum pelaksanaan program atau kegiatan tahun 2020 pada Dinas Sosial Kota Bima, diantaranya ;

- a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- c. Meningkatnya disiplin aparatur
- d. Meningkatnya kualitas penyajian laporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin
- f. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
- g. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- h. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis daripada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan. *Program* merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. *Kegiatan*

adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dengan Indikator kinerja utamanya adalah penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bima. Program dan Kegiatan yang akan dirancang harus berdasarkan Renstra SKPD seperti pada tabel **TABEL T - C.33 (terlampir)**.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat. Oleh karena itu diharapkan mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial dan dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan (*stakeholders*) baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial secara lokal, dan regional.

Demikian dan semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dibidang kesejahteraan Sosial Kota Bima.

Raba-Bima, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Bima.



Drs. H. MUHIDIN, MM

Nip. 196312311990031209

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bima tahun 2014-2018

(Dalam ribuan rupiah)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-										
										2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)											
1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Menurunnya PMKS	Persentase penurunan PMKS	1 06 01 00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kegiatan administrasi perkantoran				80%	85%	90%	98%	100%	80%	85%	90%	98%	100%	80%	85%	90%	98%	100%						
				1 06 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/netuasa penerantar surat)	Cakupan surat yang terkirim				1200	1250	1300	1400	1500	1200	1250	1300	1400	1442	100	100	100	100	100	96,13333					
				1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	Cakupan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100				
				1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas				4	6	8	8	10	4	6	8	8	10	100	100	100	100	100	100	100				
				1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengeola administrasi Keuangan)	Cakupan pembayaran jasa administrasi keuangan				12	12	12	10	11	12	12	12	10	11	100	100	100	100	100	100	100	100			
				1 06 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih				0	0	510	550	565	0	0	510	550	565	0	0	100	100	100	100	100	100			
				1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan penyediaan ATK				31	30	31	32	50	31	30	31	32	50	100	100	100	100	100	100	100	100			
				1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Cakupan pengadaan dan cetak bahan				37.000	38.000	40.000	45.000	47.250	35.000	37.000	39.500	45.000	47.250	94	97	98,75	100	100	100	100	100			
				1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik				12	12	12	6	6	12	12	12	6	6	100	100	100	100	100	100	100	100			
				1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor				6	7	7	8	8	5	6	6	7	8	83	85	85	87,5	100	100	100	100			
				1 06 01 14	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	100			
				1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan kerjasama dengan media				5	5	6	7	8	5	5	6	7	7	100	100	100	100	100	100	100	87,5			
				1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Kegiatan makan minum rapat				25	30	45	50	55	30	30	45	50	55	120	100	100	100	100	100	100	100			
				1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				60	75	75	75	80	60	75	75	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				1 06 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				0	0	50	55	62	0	0	50	55	62	0	0	100	100	100	100	100	100			
				2				1 06 02 00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				83%	84%	100%	98%	87%	83%	84%	100%	98%	87%	83%	84%	100%	98%	87%		
								1 06 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas baru				0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	100	0	100	100	100	100	
								1 06 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor				25	25	30	30	35	25	25	30	30	35	100	100	100	100	100	100	100
								1 06 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur				5	0	5	6	6	5	0	5	6	100	0	100	100	100	100	100	
1 06 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan gedung kantor yang direhab/pelihara								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100					
1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara								12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	100				
3				1 06 03 00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
				1 06 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah seragam dinas lengkap yang diadakan				27 stel	26 stel	27 stel	0%	0%	27 stel	26 stel	27 stel	0%	0%	27 stel	26 stel	27 stel	0	0						
				1 06 03 02	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan				0	0	0	0	40 stel	0	0	0	0	40 stel	0	0	0	0	0	40 stel					
				1 06 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah seragam olahraga yang diadakan				27 stel	26 stel	27 stel	0	0	27 stel	26 stel	27 stel	0	0	27 stel	26 stel	27 stel	0	0						
4				1 06 06 00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LKIP				CC	B	B	BB	A	CC	B	B	BB	A	CC	B	B	BB	A						
				1 06 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok				
				1 06 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				
				1 06 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				0	2 dok	0	2 dok	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	2 dok				
				1 06 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				
				1 06 06 05	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja				5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok				
				1 06 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan				5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok				
				5				1 06 21 00	Program pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase PMKS yang Terlatih				100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	90%	100%			
1 06 15 01	Pelatihan Tenaga Pendamping Sosial Pemberdayaan fakir miskin	Jumlah Tenaga Pendamping Sosial yang mengikuti pelatihan								43	43	43	43	43	43	43	43	43	100	100	100	100	100	100						
1 06 15 02	Bimbingan Teknis Kelompok usaha bersama (KUBE) bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mengikuti Bimtek								120	120	120	60	60	120	120	120	60	60	100	100	100	100	100						
1 06 15 09	Penyuluhan Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial								0	0%	50 org	50 org	50 org	0	0%	50 org	50 org	50 org	0	0	0	50 org	50 org						
1 06 15 10	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan rujukan terpadu yang difasilitasi oleh suksesos								0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	1 laporan						
1 06 15 11	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	Jumlah Keluarga Penerima manfaat yang memperoleh BPNT								0	0	0	8393 KK	8393 KK	0	0	0	8393 KK	8393 KK	0	0	0	8393 KK	8393 KK						
1 06 16 00	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial								99,64	99,64	99,64	96,93	3 Kali	99,64	99,64	99,64	96,93	3 Kali	99,64	99,64	99,64	96,93	3 Kali						
6				1 06 16 10	Bantuan Bencana Sosial	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100							
				1 06 16 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monev				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	3 laporan	4 laporan	5 laporan	6 laporan							

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Dinas sosial Kota Bima

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Bima	Persentase kegiatan administrasi perkantoran	100%	555.968.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Bima	Persentase kegiatan administrasi perkantoran	100%	626.411.500
	Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	Kota Bima	cakupan surat yang terkirim	3500 lembar	30.973.000	Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	Kota Bima	cakupan surat yang terkirim	3500 lembar	31.850.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	Kota Bima	cakupan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 buah	34.560.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	Kota Bima	cakupan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 buah	18.360.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	10 unit	30.300.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	8 unit	24.100.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)	Kota Bima	Cakupan pembayaran jasa administrasi keuangan	100%	62.926.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)	Kota Bima	Cakupan pembayaran jasa administrasi keuangan	100%	63.790.000
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Kota Bima	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	10.920.000	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Kota Bima	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	10.920.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Cakupan penyediaan ATK	240 jenis	35.529.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Cakupan penyediaan ATK	75 jenis atk	43.919.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Cakupan penggandaan dan cetak bahan	47560 lembar	15.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Cakupan penggandaan dan cetak bahan	47560 lembar	24.382.500
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Cakupan komponen intalasi listrik	22 jenis	5.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Cakupan komponen intalasi listrik	22 jenis	5.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	38.600.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	38.600.000
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	5.000.000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	7.600.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Cakupan kerjasama dengan media	10 media	5.760.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Cakupan kerjasama dengan media	8 media	5.760.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Cakupan kegiatan makan minum rapat	8 kali	17.400.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Cakupan kegiatan makan minum rapat	8 kali	17.400.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	194.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	250.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 kali	70.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 kali	84.730.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Bima	persentase ketersediaan sarana dan prasarana		66.700.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Bima	persentase ketersediaan sarana dan prasarana		59.550.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Kota Bima	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	1 unit	18.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Kota Bima	Kendaraan Dinas /operasional	1 unit	18.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 unit	3.650.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	perlengkapan gedung kantor	7 unit	3.650.000
	Pengadaan Mebeleur	Kota Bima	Jumlah pengadaan mebeleur	3 buah	15.050.000	Pengadaan Mebeleur	Kota Bima	Lemari, meja, kursi	3 buah	14.900.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bima	Persentase terpeliharanya gedung kantor	100%	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100%	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	100%	13.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kota Bima	Persentase disiplin aparatur		24.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kota Bima	Persentase disiplin aparatur		23.800.000
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kota Bima	Pakaian Khusus hari-hari tertentu	27 stel	24.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kota Bima	Pakaian Khusus hari-hari tertentu	27 stel	23.800.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Bima	Nilai LKIP	BB	116.270.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Bima	Nilai LKIP	BB	116.270.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen Laporan kinerja dan realisasi keuangan	1 dokumen	16.120.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	Laporan kinerja dan realisasi keuangan	1 dokumen	16.120.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Jumlah dokumen keuangan semesteran	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Laporan keuangan semesteran	1 dokumen	15.000.000
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah dokumen kinerja dan realisasi keuangan	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Laporan kinerja dan realisasi keuangan	1 dokumen	15.000.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	20.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumenRKA/RKA/DPA/DPPA	1 dokumen	31.150.000	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Renja/RKA/DPA/DPPA	1 dokumen	31.150.000
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah dokumen LAKIP, LPJ, LPPD	1 dokumen	19.000.000	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	LAKIP, LPJ, LPPD	1 dokumen	19.000.000
5	Program pemberdayaan Fakir Miskin	Kota Bima	Persentase penurunan fakir miskin	100%	600.351.500	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Kota Bima	Persentase PMKS yang Terlatih	100%	708.716.000
	Pelatihan Tenaga pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin	Kota Bima	Jumlah tenaga pendamping sosial yang mengikuti pelatihan	43 Orang	28.944.000,00	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kota Bima	Jumlah PSM/TKSK yang diberdayakan	43 Orang	21.474.000
	Bimbingan teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga miskin	Kota Bima	Jumlah Keluarga Miskin yang mengikuti Bimbingan Teknis KUBE	120 orang	171.264.000,00	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kota Bima	Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih	120 orang	368.064.000

Monitoring dan Evaluasi	Kota Bima	Jumlah Laporan Monev	1 laporan	10.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi	Kota Bima	Jumlah Laporan Monev	1 laporan	10.000.000
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kota Bima	Jumlah PMKS seluruhnya	9334	30.215.500,00	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kota Bima	Jumlah PMKS seluruhnya	9334	5.000.000
Penyuluhan Sosial	Kota Bima	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial	50 org	19.885.000,00	Penyuluhan Sosial	Kota Bima	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial	50 org	19.885.000
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Kota Bima	Basis data Fakir miskin	1 laporan	300.000.000,00	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Kota Bima	Basis data Fakir miskin	1 laporan	244.800.000
Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	Kota Bima	Jumlah Keluarga PKH dan KKS	8393 KK	40.043.000,00	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	Kota Bima	Jumlah Keluarga PKH dan KKS	8393 KK	39.493.000
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kota Bima	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial	80%	597.847.000	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kota Bima	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial	80%	550.044.000
Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kota Bima	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat	80%	168.934.000	Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kota Bima	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat	80%	163.234.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Bima	Laporan monev	1 laporan	10.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Bima	Laporan monev	1 laporan	10.000.000
Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Kota Bima	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	3745 KK	300.000.000,00	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Kota Bima	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	3745 KK	272.897.000
Pendampingan Kegiatan Kereserian Sosial		Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	5 kelompok	24.881.000,00	Pendampingan Kegiatan Kereserian Sosial		Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	5 kelompok	22.381.000
Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Kota Bima	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah	1200 orang	37.200.000,00	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Kota Bima	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah	1200 orang	31.200.000
Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	Kota Bima	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani	80%	29.116.000,00	Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	Kota Bima	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani	80%	22.616.000
Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Kota Bima	Basis data dana bantuan sosial	1 laporan	27.716.000,00	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Kota Bima	Basis data dana bantuan sosial	1 laporan	27.716.000
7 Program Pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Kota Bima	Jumlah anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)		46.990.000	Program Pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Kota Bima	Jumlah anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)		46.990.000
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kota Bima	Persentase anak terlantar yang terlatih	100%	21.990.000,00	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kota Bima	Persentase anak terlantar yang terlatih	100%	21.990.000
Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Kota Bima	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang	80%	15.000.000,00	Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Kota Bima	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang	80%	15.000.000
Monitoring dan Evaluasi		Laporan Monev	1 laporan	10.000.000	Monitoring dan Evaluasi		Laporan Monev	1 laporan	10.000.000
8 Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	Kota Bima	Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani	80%	32.165.000	Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	Kota Bima	Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani	80%	22.865.000
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kota Bima	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan	50 org	27.165.000	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kota Bima	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan	50 org	17.865.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Bima	Laporan monev	1 laporan	5.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Bima	Laporan monev	1 laporan	5.000.000
9 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)	Kota Bima	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	80%	35.996.500	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)	Kota Bima	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	80%	22.996.500
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kota Bima	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	80%	35.996.500	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kota Bima	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	80%	22.996.500
10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kota Bima	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1	138.707.000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kota Bima	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1	137.357.000
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kota Bima	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	27 LKS	21.279.000	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kota Bima	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	27 LKS	20.579.000
Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Kota Bima	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	50 orang	59.111.000	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Kota Bima	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	50 orang	58.461.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Bima	Laporan monev	1 laporan	15.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Bima	Laporan monev	1 laporan	15.000.000
Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kota Bima	Jumlah Lomba PSKS	5 kegiatan	43.317.000	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kota Bima	Jumlah Lomba PSKS	5 kegiatan	43.317.000

Kepala Dinas Sosial Kota Bima,





Drs. H. Muhidin, MM
Nip. 19631231 199003 1 209

1	06	1.06.01	15	10		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan rujukan terpadu yang difasilitasi oleh Puskessos	Kota Bima	650 KK	450.000.000	APBD II		750 KK	495.000.000
1	06	1.06.01	15	10	5.2.1	Belanja Pegawai								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis kantor								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.03.01	- Belanja Telepon								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.03.12	- Belanja jasa Non Pegawai								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.06.02	- Belanja Penggandaan								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.06.03	- Belanja Penjiilidan								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto/Dokumentasi								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.07.03	- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.11.05	- Belanja Makan dan Minum Diklat, Seminar, Lokalisasi dan sejenisnya								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.20.05	- Belanja Pemilihan Gedung Dan Bangunan								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.2.15.04	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.3.	Belanja Modal								
1	06	1.06.01	15	10	5.2.3.29.05	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer								
1	06	1.06.01	15	11		Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan KuBE Jasa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh BPNT	Kota Bima	9618 KK	60.000.000	APBD II		9624 KK	66.000.000
1	06	1.06.01	15	11	5.2.1	Belanja Pegawai								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Linya								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.01.10	- Belanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.06.01	- Belanja Cetak								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.06.03	- Belanja Penjiilidan								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto /Dokumentasi								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.11.02	- Belanja Makan dan Minum Rapat								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya								
1	06	1.06.01	15	11	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli								
1	06	1.06.01	21			PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Kota Bima	80%	132.000.000	APBD II		85%	937.200.000
1	06	1.06.01	21	03		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pengurus LKS yang mengikuti pelatihan	Kota Bima	30 LKS	22.000.000	APBD II		30 LKS	24.200.000
1	06	1.06.01	21	03	5.2.1	Belanja Pegawai								
1	06	1.06.01	21	03	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan								

1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.01.10	- Belanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.06.03	- Belanja Penjilidan									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto /Dokumentasi									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.07.03	- Belanja Sewa Gedung/Gudang/Parkir									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.11.04	- Belanja Makan dan Minum Pelatihan									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya									
1	06	1.06.01	21	03	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli									
1	06	1.06.01	21	05		Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	Kota Bima	50 orang	65.000.000	APBD II		50 orang	71.500.000	
1	06	1.06.01	21	05	5.2.1	Belanja Pegawai									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.01.10	- Belanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.02.06	- Belanja Persediaan Makanan Pokok									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.03.12	- Belanja jasa Non Pegawai									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.06.01	- Belanja Cetak									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.10.01	- Belanja Sewa Meja Kursi									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.10.05	- Belanja Sewa Tenda									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.10.07	- Belanja Sewa Sound System									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.10.08	- Belanja Sewa Tanaman Hias									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.11.04	- Belanja Makan dan Minum Pelatihan									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.11.05	- Belanja Makan Minum Diklat, Seminar, Lokakarya dan sejenisnya									
1	06	1.06.01	21	05	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya									
1	06	1.06.01	21	07		Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang berprestasi	Kota Bima	4 kegiatan	45.000.000	APBD II		5 kegiatan	49.500.000	
1	06	1.06.01	21	07	5.2.1	Belanja Pegawai									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.1.01.01	- Honorarium Tim Penilai Lomba									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.1.05.02	- Uang yg diberikan kepada masyarakat									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.01.10	- Bealanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.06.03	- Belanja Penjilidan									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto /Dokumentasi									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.11.02	- Belanja Makan dan Minum Rapat									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.11.05	- Balanja Makan Minum Diklat, Seminar, Lokakarya dan sejenisnya									
1	06	1.06.01	21	07	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya									
1	06	1.06.01	16			PROGRAM PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Bima	80%	567.000.000	APBD II		85%	594.000.000	

1	06	1.06.01	16	10		Bantuan Bencana Sosial	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat	Kota Bima	80%	180.000.000	APBD II	80%	198.000.000
1	06	1.06.01	16	10	5.2.1	Belanja Pegawai							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.1.01.01	- Honorarium Pengelola barang bencana							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.01.06	- Belanja BBM							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.01.10	- Belanja Umbul2/spanduk/bendera/baliho							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.03.12	- Belanja Jasa non pegawai							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.06.03	- Belanja Penjilidan							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.06.04	- Belanja cetak foto							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.08.01	- Belanja sewa sarana mobilitas darat							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.13.01	- Belanja Pakaian Kerja Lapangan							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah							
1	06	1.06.01	16	10	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya (Orang terlantar)							
1	06	1.06.01	16	12		Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Kota Bima	6062 KK	300.000.000	APBD II	6262 KK	330.000.000
1	06	1.06.01	16	12	5.2.1	Belanja Pegawai							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.1.01.01	- Honorarium Tim Koordinasi							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.1.01.01	- Honorarium Tim Koordinasi TK. Kota							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Linya							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.03.01	- Belanja Telepon							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.03.02	- Belanja Listrik							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.03.12	- Belanja Jasa Non Pegawai							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.06.03	- Belanja Penjilidan							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.11.02	- Belanja Makan dan Minum Rapat							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.11.05	- Belanja Makan dan Minum Diklat, Seminar, Lokalisai dan Sejenisnya							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.13.01	- Belanja Pakaian Kerja Lapangan							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.15.02	- BelanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.20.04	- Belanja Pemilihan Peralatan dan Mesin							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.20.05	- Belanja Pemilihan Gedung dan bangunan							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.21.04	- Belanja Jasa Konsultasi Teknik							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber / Ahli							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.3	Belanja Modal							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.3.27.04	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.3.29.02	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.3.29.04	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer							
1	06	1.06.01	16	12	5.2.3.31.01	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pengadaan Alat Studio							

1	06	1.06.01	16	13		Pelaksanaan Kegiatan Keserasian Sosial	Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	Kota Bima	5 kelompok	25.000.000	APBD II		5 kelompok	27.500.000
1	06	1.06.01	16	13	5.2.1	Belanja Pegawai								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.01.10	- Bealanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.03.12	- Belanja Jasa Non Pegawai								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.06.03	- Belanja Penjiilidan								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto /Dokumentasi								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.07.03	- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.11.05	- Belanja Makan dan Minum Diklat, Sosialisasi, Lokalisasi dan Sejenisnya								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya								
1	06	1.06.01	16	13	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli								
1	06	1.06.01	16	14		Pelayanan JKN PBI	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah	Kota Bima	1200 orang	35.000.000	APBD II		1200 orang	38.500.000
1	06	1.06.01	16	14	5.2.1	Belanja Pegawai								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.01.10	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Linya								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.03.12	- Bealanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.06.03	- Belanja Penjiilidan								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.06.04	- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.07.03	- Belanja Makan dan Minum Rapat								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.11.05	- Belanja Makan dan Minum Diklat, Seminar, Lokalisasi dan Sejenisnya								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya								
1	06	1.06.01	16	14	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli								
1	06	1.06.01	16	16		Sosialisasi UGB	Basis data dana bantuan sosial	Kota Bima	1 laporan	27.000.000	APBD II		80%	29.700.000
1	06	1.06.01	16	16	5.2.1	Belanja Pegawai								
1	06	1.06.01	16	16	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan								
1	06	1.06.01	16	16	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa								
1	06	1.06.01	16	16	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor								
1	06	1.06.01	16	16	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Linya								
1	06	1.06.01	16	16	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan								
1	06	1.06.01	16	16	5.2.2.06.03	- Belanja Penjiilidan								
1	06	1.06.01	16	16	5.2.2.11.02	- Belanja Makan dan Minum Rapat								
1	06	1.06.01	17			PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi sosial	Kota Bima	80%	467.720.000	APBD II		80%	514.492.000
1	06	1.06.01	17	02		Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terlatih	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD II		100%	27.500.000

1	06	1.06.01	18	04	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli												
1	06	1.06.01	18	05		Penyusunan Rancangan PERDA tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Dokumen Rancangan PERDA tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Kota Bima	50 orang	74.500.000	APBD II		50 orang	81.950.000				
1	06	1.06.01	18	05	5.2.1	Belanja Pegawai												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis kantor												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.01.10	- Belanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.06.03	- Belanja Penjilidan												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto /Dokumentasi												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.07.03	- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.11.05	- Belanja Makan dan Minum Pelatihan												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya												
1	06	1.06.01	18	05	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli												
1	06	1.06.01	18	06		Gebyar Penyandang Disabilitas	Jumlah Kegiatan Gebyar	Kota Bima	50 orang	60.910.000	APBD II		50 orang	67.001.000				
1	06	1.06.01	18	06	5.2.1	Belanja Pegawai												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis kantor												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.01.10	- Belanja Spanduk, Umbul-umbul / Bendera / Baliho												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.06.02	- Belanja Pengandaan												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.06.03	- Belanja Penjilidan												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto /Dokumentasi												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.07.03	- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.11.05	- Belanja Makan dan Minum Pelatihan												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.17.05	- Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan Lainnya												
1	06	1.06.01	18	06	5.2.2.28.01	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli												
1	06	1.06.01	20	04		Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	Kota Bima	60%	25.000.000	APBD II		70%	27.500.000				
1	06	1.06.01	20	04	5.2.1	Belanja Pegawai												
1	06	1.06.01	20	04	5.2.1.01.01	- Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan												
1	06	1.06.01	20	04	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa												
1	06	1.06.01	20	04	5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor												
1	06	1.06.01	20	04	5.2.2.06.02	- Belanja Pengadaan												
1	06	1.06.01	20	04	5.2.2.06.03	- Belanja Penjilidan												
1	06	1.06.01	20	04	5.2.2.06.04	- Belanja Cetak Foto/Dokumentasi												
1	06	1.06.01	20	04	5.2.2.11.05	- Belanja Makan dan Minum Pelatihan												
						TOTAL				3.236.680.000								

Kota Bima, Juli 2019
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. H. Muhidin, MM
NIP.19690531 199003 1 004